

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah resmi dijalankan di Indonesia sejak dikeluarkannya peraturan perundang-undangan No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 dan 34 tahun 2004. Otonomi daerah salah satunya dicirikan dengan adanya desentralisasi fiskal, dimana menurut UU No. 32 tahun 2004 desentralisasi di definisikan sebagai pemberian wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif, sehingga perumusan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tanggung jawab dari masing-masing daerah.”

Sistem desentralisasi menyebabkan peran pemerintah pusat lebih dibatasi terhadap daerah karena tujuan dari sistem desentralisasi sendiri yaitu untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah dengan memaksimalkan sumber-sumber kekayaan daerahnya sendiri yang nantinya akan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintahan pusat serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui penyediaan fasilitas publik yang akan berujung pada pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sesuai dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom .

Otonomi daerah berdampak pada terjadinya perlimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintahan daerah dimana terdapat 16 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota, dan hanya 6 kewenangan yang masih berada di pusat yaitu politik luar negeri, keamanan, pertahanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama. Kewenangan yang tertuang di dalam otonomi daerah tidak terbatas hanya pada dimensi urusan pemerintahan, namun juga memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah dalam mengurus keuangan mereka, hal ini bertujuan merangsang kemandirian pemerintah daerah kearah yang tepat sasaran sehingga tujuan dari pembangunan nasional dapat terpenuhi.”

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dijelaskan mengenai sumber sumber penerimaan desentralisasi fiskal yang dibagi menjadi tiga macam yaitu pajak daerah, dana bagi hasil, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan asli daerahnya, sehingga nantinya akan tercipta kemandirian dari pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Kemandirian pemerintah daerah dapat dicapai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisah dan PAD lain-lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 33 tahun 2004 Pasal 6.

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak dan restribusi daerah. Untuk itu pemerintahan daerah perlu melakukan upaya

intensifikasi ataupun ekstensifikasi dalam mengelola sumber-sumber pendapatan tersebut. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dengan kata lain semakin besar porsi PAD suatu daerah terhadap total penerimaan daerahnya menyiratkan bahwa semakin berhasil suatu daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat.

Tabel 1.1
Porsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah
Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2013-2017

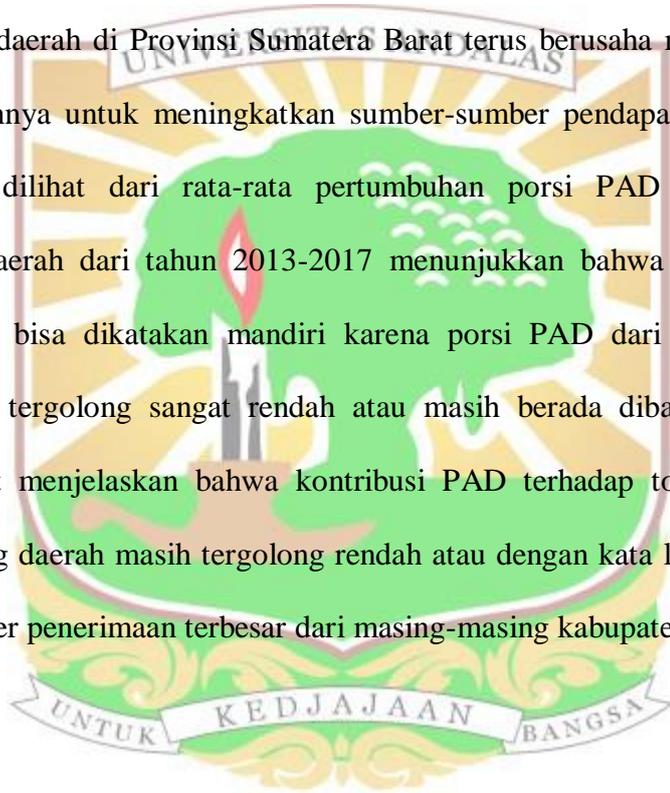
| No | Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 1 | Kep Mentawai | 4,44 | 4,35 | 5,77 | 4,79 | 4,17 | 4,70 |
| 2 | Pesisir Selatan | 4,27 | 3,90 | 6,62 | 5,11 | 7,22 | 5,42 |
| 3 | Kabupaten Solok | 3,48 | 3,19 | 4,22 | 3,93 | 5,40 | 4,04 |
| 4 | Sijunjung | 4,53 | 5,36 | 6,46 | 6,28 | 10,05 | 6,54 |
| 5 | Tanah Datar | 6,56 | 5,62 | 8,45 | 8,62 | 9,83 | 7,82 |
| 6 | Padang Pariaman | 4,05 | 3,39 | 5,29 | 4,82 | 5,87 | 4,68 |
| 7 | Agam | 4,20 | 4,97 | 5,89 | 6,50 | 6,93 | 5,70 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 3,05 | 4,29 | 4,86 | 5,51 | 5,64 | 4,67 |
| 9 | Pasaman | 4,03 | 4,42 | 6,53 | 5,85 | 7,27 | 5,62 |
| 10 | Solok Selatan | 4,98 | 6,07 | 4,67 | 4,53 | 5,72 | 5,19 |
| 11 | Dharmasraya | 6,40 | 7,95 | 8,37 | 7,63 | 8,26 | 7,72 |
| 12 | Pasaman Barat | 5,31 | 5,29 | 7,28 | 6,28 | 7,08 | 6,25 |
| 13 | Padang | 11,95 | 14,71 | 23,16 | 20,57 | 21,84 | 18,45 |
| 14 | Solok | 5,91 | 4,51 | 5,39 | 6,28 | 6,55 | 5,73 |
| 15 | Sawah Lunto | 8,17 | 7,88 | 9,86 | 9,28 | 8,97 | 8,83 |
| 16 | Padang Panjang | 7,58 | 7,03 | 9,37 | 8,80 | 9,45 | 8,45 |
| 17 | Bukittinggi | 9,25 | 8,63 | 10,56 | 9,91 | 19,94 | 11,66 |
| 18 | Payakumbuh | 8,85 | 9,19 | 9,93 | 11,97 | 14,87 | 10,96 |
| 19 | Pariaman | 2,50 | 2,92 | 4,12 | 4,24 | 15,70 | 5,90 |

Sumber : data diolah, 2019

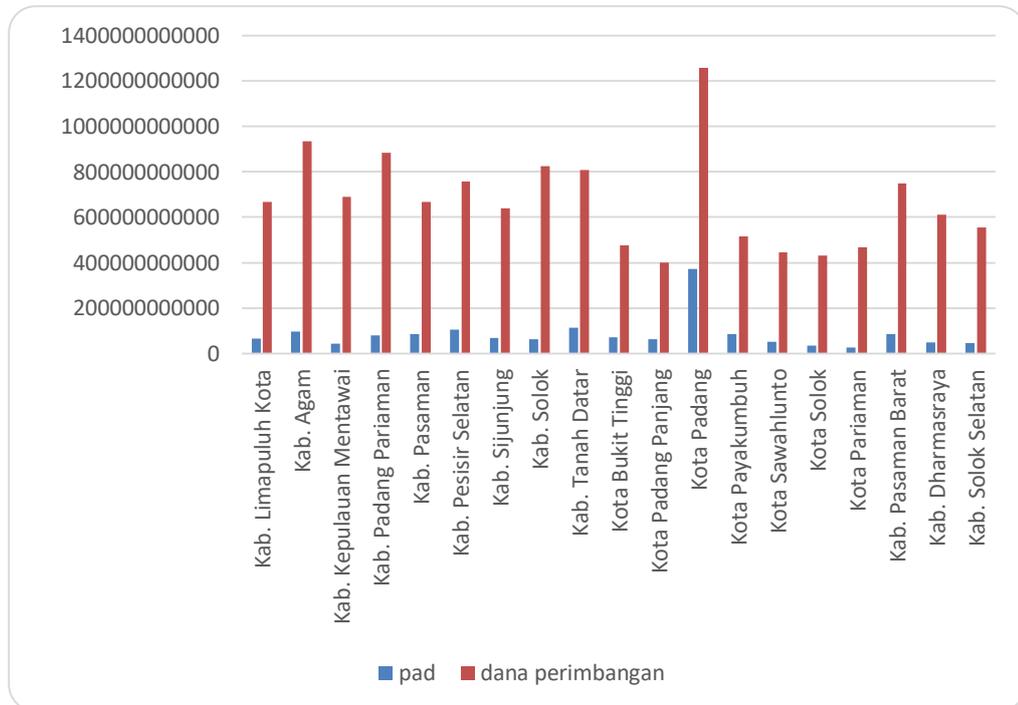
Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 12 kabupaten dan 7 kota berada pada kemampuan keuangan daerah yang masih tergolong sangat rendah sehingga dituntut untuk dapat meningkatkan kemandirian

keuangan daerahnya dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintahan pusat, menyediakan fasilitas publik, mendorong pembangunan infrastruktur dan SDM sehingga dapat menjadi stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa porsi PAD terhadap total penerimaan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahun nya, hal ini mengisyaratkan bahwa setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat terus berusaha memaksimalkan potensi daerahnya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan porsi PAD terhadap total penerimaan daerah dari tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa masing-masing daerah belum bisa dikatakan mandiri karena porsi PAD dari masing-masing daerah masih tergolong sangat rendah atau masih berada dibawah 25%. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan masing-masing daerah masih tergolong rendah atau dengan kata lain PAD belum menjadi sumber penerimaan terbesar dari masing-masing kabupaten/kota.



Gambar 1
Rata-Rata Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan
Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nasional, 2018

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa sumber penerimaan masing-masing kabupaten/kota masih didominasi oleh dana perimbangan dari pusat sedangkan perolehan PAD masih relatif kecil, hal ini mengisyaratkan bahwa kabupaten/kota di Sumatera Barat masih belum mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya karena masih bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU maupun DAK. Nilai PAD yang relatif kecil dibanding penerimaan dana perimbangan ini juga mengisyaratkan bahwa kemampuan pemerintahan daerah kabupaten/kota masih belum maksimal dalam menggali potensi sumber-sumber PAD.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PAD
Kabupaten/Kota Sumatera Barat

| Kabupaten/Kota | Pertumbuhan Ekonomi | | Pertumbuhan PAD | |
|-----------------|---------------------|------|-----------------|--------|
| | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 |
| Kep Mentawai | 5,57 | 5,13 | 20,66 | -14,48 |
| Pesisir Selatan | 5,9 | 5,52 | 17,72 | 3,71 |
| Kabupaten Solok | 5,63 | 5,33 | 18,01 | 0,80 |
| Sijunjung | 6,14 | 5,27 | 31,57 | 10,31 |
| Tanah Datar | 5,85 | 5,12 | 17,51 | 3,01 |
| Padang Pariaman | 6,2 | 5,59 | 21,14 | 2,48 |
| Agam | 6,15 | 5,43 | 14,33 | 2,16 |
| Lima Puluh Kota | 6,23 | 5,34 | 14,71 | 3,80 |
| Pasaman | 5,82 | 5,09 | 9,12 | -1,28 |
| Solok Selatan | 6,13 | 5,15 | 11,65 | 2,98 |
| Dharmasraya | 6,51 | 5,45 | 14,78 | 8,38 |
| Pasaman Barat | 6,4 | 5,35 | 18,59 | -1,22 |
| Padang | 6,66 | 6,23 | 16,18 | 6,24 |
| Solok | 6,44 | 5,78 | 11,99 | 1,84 |
| Sawah Lunto | 6,11 | 5,75 | 10,36 | -2,76 |
| Padang Panjang | 6,29 | 5,81 | 18,95 | 7,48 |
| Bukittinggi | 6,28 | 6,08 | 14,32 | 0,91 |
| Payakumbuh | 6,56 | 6,12 | 13,97 | 0,16 |
| Pariaman | 6,06 | 5,62 | 13,16 | 2,81 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2018

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dari masing-masing kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013-2016 namun pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah mulai meningkat kembali pada tahun 2017. Walaupun mengalami peningkatan di tahun 2017 namun dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi dari masing-masing daerah beberapa tahun terakhir berada pada kondisi yang kurang baik. Penurunan pertumbuhan ekonomi di

masing-masing daerah juga diikuti oleh penurunan pertumbuhan penerimaan PAD dari masing-masing daerah seperti yang terlihat pada tabel 1.2. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2007) yang mengatakan bahwa PDRB sebagai tolak ukur pendapatan masyarakat memiliki hubungan fungsional dengan PAD dimana ketika PDRB suatu daerah meningkat maka akan menambah penerimaan daerah dalam pembiayaan program pembangunan daerah dan begitupun sebaliknya.

Banyak penelitian terdahulu yang telah mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal ini namun hubungan antara kedua hal ini masih diperdebatkan dikalangan para peneliti dimana masih ditemukan hasil yang berbeda-beda antara hubungan pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Hal ini patut untuk dikaji kembali karena telah terjadi perubahan dalam skema desentralisasi pada saat ini dimana pemerintahan pusat memberikan dana perimbangan yang begitu besar kepada pemerintah daerah dan jumlahnya selalu meningkat pada setiap tahunnya. Dengan demikian berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka diperlukan suatu penelitian untuk menganalisis permasalahan tersebut sehingga penulis memberi judul penelitian ini dengan **“ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikajilagi seberapa besar tingkat kemandirian daerah di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi

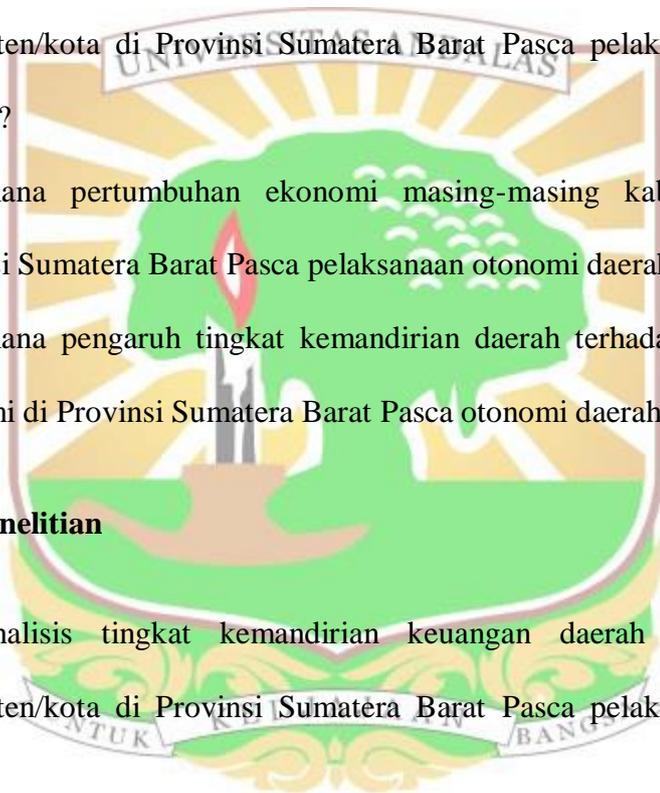
Sumatera Barat Pasca otonomi daerah agar dapat dibuat suatu penyelesaian ataupun kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai peningkatan penerimaan daerah yang mampu membiayai pengeluaran daerahnya yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Pasca pelaksanaan otonomi daerah ?
2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Pasca pelaksanaan otonomi daerah ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Pasca otonomi daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Pasca pelaksanaan otonomi daerah.
2. Menganalisis pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Pasca pelaksanaan otonomi daerah.
3. Menganalisis pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Pasca otonomi daerah.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan penulis mengenai tingkat kemandirian daerah Pasca pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam menentukan kebijakan yang tepat, guna meningkatkan kemandirian daerah.
3. Sebagai bahan pustaka, informasi dan referensi bagi yang memerlukan serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah meliputi rasio kemandirian daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi di gunakan analisis regresi linear berganda dimana pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan tingkat kemandirian daerah sebagai variabel independen.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdapat 6 poin penting yang dibahas yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. Latar Belakang meliputi realita kondisi PAD yang terjadi di daerah yang menjadi objek penelitian yaitu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, rumusan masalah yang diambil berdasarkan hasil kesimpulan dari latar belakang penelitian ini, setelah adanya rumusan masalah maka pada bab ini juga membahas tentang tujuan dari penelitian, tujuan penelitian biasanya dirumuskan untuk menjawab hasil dari rumusan masalah yang telah dibentuk. Ruang lingkup dari penelitian meliputi variabel dependen dan variabel independen yang menjadi alat uji dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori umum yang relevan dengan penelitian yaitu tentang teori otonomi daerah, kemandirian daerah, keuangan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian juga menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variabel pokok dalam penelitian, selain itu bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang daerah/lokasi penelitian dimana yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga menguraikan tentang data dan sumber data yang digunakan dan diperoleh oleh penulis dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat selain itu bab ini juga memuat metode analisis data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis linear berganda, kemudian memuat definisi operasional variabel yang meliputi variabel dependen dan variabel Independen.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi perkembangan variabel-variabel yang dibahas didalam penelitian ini seperti perkembangan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, perkembangan kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan nilai PDRB/kapita Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan paparan dan interpretasi hasil dari pengujian yang dilakukan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini sehingga nantinya akan lahir suatu saran atau sumbangan kebijakan bagi para pihak yang memerlukan.

